

## Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pemberdayaan Nelayan

### *Institutional Capacity Building for Fishers Empowerment*

Denny Hernawan<sup>1</sup>, Agustina Multi Purnomo<sup>2\*</sup>, Irma Purnamasari<sup>3</sup>, Afmi Apriliani<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Djuanda

<sup>2</sup>Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Djuanda

email: denny.hernawan@unida.ac.id<sup>1</sup>, agustina.m@unida.ac.id<sup>2</sup>,  
irma.purnamasari@unida.ac.id<sup>3</sup>, afmi.apriliani@unida.ac.id<sup>3</sup>

\*Corresponding author: agustina.m@unida.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Upaya pemberdayaan nelayan memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Pelatihan dapat menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Oleh karenanya kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas nelayan untuk pemberdayaan nelayan. Pelaksanaan pelatihan mengacu pada hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim yang dilaksanakan di komunitas nelayan Pelabuhanratu pada tahun 2018-2021. Pelatihan dilakukan untuk 20 nelayan di Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Pemilihan peserta dan mitra penyelenggaraan pelatihan mengacu pada nelayan mitra penelitian pendahuluan. Rancangan pencapaian tujuan pelatihan disusun dalam beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pelatihan menunjukkan terdapat perubahan di ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan di ranah keterampilan dan sikap lebih nyata daripada perubahan di ranah pengetahuan. Hasil dari pelaksanaan pelatihan menunjukkan pelatihan dapat berhasil jika didukung oleh perencanaan yang baik mengacu pada hasil penelitian yang memadai, penggunaan beragam metode penyampaian materi dan teknik advokasi dalam pelatihan. Keberhasilan pelaksanaan pelatihan ditunjang oleh pengenalan yang baik dari penyelenggara terhadap konteks masyarakat peserta pelatihan.

**Kata kunci:** kapasitas kelembagaan; nelayan; pelatihan; pelabuhanratu; pemberdayaan

### ABSTRACT

*Efforts to empower fishers require increasing the institutional capacity of fishers. Training can be one of the efforts to increase the institutional capacity of fishers. Therefore, service activities are carried out in the form of training to increase the capacity of fishers to empower fishers. The training implementation refers to the research results on Increasing Institutional Capacity of Fishermen for Adaptation to Climate Change which was carried out in the fishing community of Pelabuhanratu in 2018-2021. The training was conducted for 20 fishers in Pelabuhanratu District, Sukabumi Regency. The selection of participants and partners for conducting the training refers to the preliminary research partner fishermen. The plan for achieving the training objectives is prepared in several stages: preparation, implementation, monitoring, and evaluation. The training results showed changes in knowledge, attitudes, and skills. Changes in skills and attitudes are more pronounced than changes in knowledge. The training results show that the training can be successful if supported by good planning referring to the results of adequate research, various methods of delivering materials, and advocacy techniques in training. The success of the training*

*implementation is supported by a good introduction from the organizers to the community context of the training participants.*

*Keywords:* empowerment; fishers; institutional capacity; pelabuhanratu; training

## PENDAHULUAN

Sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor penting di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km (kompas.com, Januari 2022). Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 Pulau (Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak keenam di dunia (Nurhadi, November 2021).

Sumbangan sektor perikanan pada perekonomian Indonesia mencapai 2,83% dari Produk Domestik Bruto Indonesia triwulan II 2021 (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Agustus 2021). Sumbangan sektor perikanan terhadap perekonomian Indonesia menunjukkan sumbangan penting nelayan. Jumlah nelayan laut di

Indonesia pada tahun 2019 adalah 2.088.959 jiwa. Jumlah nelayan terbanyak berada di Provinsi Maluku dan jumlah tersedikit berada di Provinsi DI Yogyakarta. Jumlah nelayan di Jawa Barat 61.022 jiwa atau menduduki posisi ke-15 provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2021). Meskipun tidak sama tinggi dengan sektor pertanian, sektor perikanan merupakan sektor yang cukup penting bagi Jawa Barat.

Upaya pemberdayaan nelayan memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Nelayan merupakan kelompok penduduk yang memerlukan upaya penguatan untuk tetap dapat berdaya dan berkontribusi secara mandiri dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Penguatan kelembagaan nelayan merupakan bagian dalam pemberdayaan nelayan (Berkes & Nayak, 2018; Scholtens et al., 2019), membangun usaha nelayan yang berkelanjutan (Stephenson et al., 2018, 2019; Yanfika et al., 2019) dan mengentaskan kemiskinan (Diz

& Morgera, 2018; Jentoft et al., 2018). Secara lebih luas, peningkatan kapasitas kelembagaan dapat mendorong ketahanan nelayan dalam menghadapi perubahan iklim, perilaku usaha nelayan yang merusak lingkungan, globalisasi perikanan, dan dampak pandemi covid-19 (Das et al., 2021; Nursey-Bray, Fidelman, & Owusu, 2018; Partelow et al., 2018; Penca, 2019; Puspitasari & Resmalasari, 2021).

Upaya pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan merupakan upaya bersama dari nelayan dan beragam pihak yang terkait (Freeman et al., 2018; Jentoft & Finstad, 2018; Nursey-Bray, Fidelman, & Owusu, 2018). Nelayan sebagai individu memiliki peran penting dalam pemberdayaan nelayan dan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Elemen nelayan sebagai individu meliputi kemampuan dan kemauan individu nelayan untuk melakukan pemberdayaan mandiri (De la Cruz-González et al., 2018), nelayan sebagai individu dan memimpin organisasi nelayan dalam mendorong penguatan kelembagaan

nelayan (Capistrano, Hossain, & Ahmed, 2020). Penguatan kapasitas individu nelayan memerlukan dukungan dari beragam pihak termasuk pemerintah dan lembaga legislatif. Interaksi antara partisipasi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan sebagai pendorong kesetaraan posisi tawar nelayan dan peran pemerintah merupakan pendorong pemberdayaan nelayan melalui kelembagaan nelayan yang kolaboratif (Hernawan, Purnomo, & Purnamasari, 2021; Quimby & Levine, 2018).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk pelatihan. Pelaksanaan pelatihan mengacu pada hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim yang dilaksanakan di komunitas nelayan Pelabuhanratu pada tahun 2018-2021. Hasil penelitian di tahun ketiga menemukan terdapat “kesenjangan” pemahaman misi antara nelayan (sebagai sasaran program), nelayan masih memiliki kelemahan dalam melakukan pemetaan masalah pokok yang dihadapi nelayan dan program

advokasi pemberdayaan masyarakat nelayan belum terarah secara efektif. Rekomendasi hasil penelitian tersebut adalah pemberdayaan nelayan memerlukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Oleh karenanya, pelaksanaan pelatihan bertujuan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan untuk memberdayakan nelayan.

## METODE PENELITIAN

Rancangan pencapaian tujuan pelatihan disusun dalam beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan telaah hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan untuk Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim. Penelitian pendahuluan tersebut memberikan informasi mengenai konteks dan kebutuhan nelayan masyarakat mitra pelatihan. Pelaksanaan pelatihan yang baik harus sesuai dengan konteks masyarakat (MacKeracher et al., 2019) dan kebutuhan nelayan (Gbenga, Solagbero, & Oluwaseun,

2020; Adisa, Oluwaseun, & Gbenga, 2021).

Telaah hasil penelitian juga merupakan langkah untuk menentukan tujuan utama, kompetensi dasar, materi pelatihan, peserta pelatihan dan mitra penyelenggara pelatihan. Materi pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan mengacu pada keterampilan untuk membangun kerjasama antar-nelayan dan antar nelayan dengan lembaga mitra (Amarasinghe & Bavinck, 2017), membangun inisiatif di tingkat komunitas nelayan (Guarda et al., 2018) dan pemberdayaan mandiri di tingkat komunitas nelayan (De la Cruz-González et al., 2018). Tahap pertama ini juga menghasilkan rancangan pelaksanaan pelatihan.

Kedua, tahap pelaksanaan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Grand Inna Samudra Beach Jalan Raya Cisolok KM 7, Pelabuhanratu. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari, pada tanggal 22 Desember 2021. Waktu pelatihan satu hari termasuk waktu pelaksanaan pelatihan pendek sehingga memerlukan kemampuan untuk

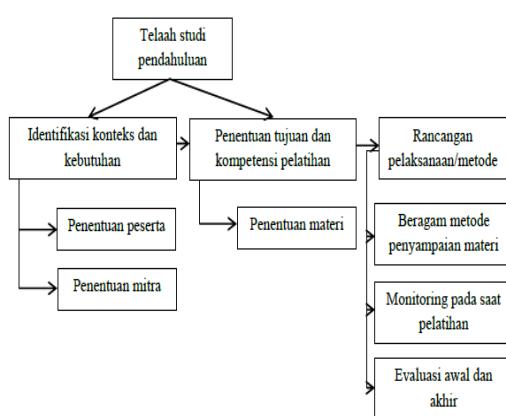
mengelola pelatihan dengan baik. Pengelolaan pelatihan dengan waktu pendek memerlukan integrasi antara materi, pelaksanaan pelatihan, perilaku, keterampilan dan pemateri dan peserta (Horn et al., 2019).

Waktu pelatihan yang pendek juga disiasati dengan penggunaan beragam metode dalam pelatihan. Pelatihan menggunakan metode ceramah atau penyampaian materi oleh narasumber, diskusi, praktik pemetaan pengetahuan dan kebutuhan nelayan serta praktik menyusun langkah-langkah sinergis dalam memenuhi kebutuhan nelayan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan nelayan sehingga nelayan dapat secara mandiri memberdayakan diri dan komunitas mereka. Penggunaan beragam cara penyampaian materi akan meningkatkan efektivitas pelatihan (Lacerenza et al., 2017).

Ketiga, tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring menggunakan metode monitoring selama pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan monitoring adalah dengan memperhatikan tanggapan peserta pelatihan dari sisi pertanyaan,

tanggapan, sikap bosan atau antusias. Metode monitoring ini dapat digunakan untuk tetap membuat peserta fokus pada pelaksanaan pelatihan (Lacerenza et al., 2017).

Evaluasi pelatihan menggunakan metode saat pelatihan dan setelah pelatihan. Evaluasi dampak pelatihan mengenai adopsi hasil pelatihan dan penyebaran hasil pelatihan pada komunitas nelayan lain (MacKeracher et al., 2019) atau dampak pelatihan lintas *stakeholders* setelah pelaksanaan pelatihan (Ferrero et al., 2019; Hanlon et al., 2018) tidak dapat dilakukan dalam kegiatan ini karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Metode evaluasi pelatihan menggunakan metode pada saat pelaksanaan pelatihan dan setelah pelatihan atau hanya mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesaat setelah pelatihan. Cara melakukan evaluasi adalah dengan memberikan *pre test* dan *post test* pelatihan untuk mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta pelatihan.



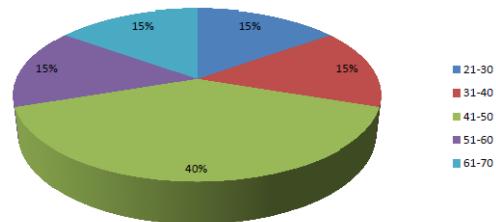
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pelatihan

Sumber: Data Primer, 2021

### Profil Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan berjumlah 20 orang dan seluruhnya adalah laki-laki. Usaha perikanan tangkap lebih banyak menjadi ranah laki-laki (Tambani, Rantung, & Wasak, 2020; Hikmah, Yulisti, & Nasution, 2017). Jenis kelamin peserta pelatihan tidak ditentukan oleh pelaksana pelatihan. Penentuan peserta pelatihan mengacu pada pelaksanaan penelitian pendahuluan. Mitra penelitian pendahuluan seluruhnya laki-laki karena nelayan yang menjadi mitra adalah nelayan tangkap. Nelayan tangkap di Pelabuhanratu seluruhnya laki-laki. Perempuan terlibat dalam penjualan dan pengolahan hasil tangkap.

Usia peserta pelatihan sebagian besar berusia 41-50 tahun atau 40% dari seluruh peserta. Kelompok usia lain menyebar masing-masing 15%. Struktur usia peserta pelatihan mendekati struktur usia penduduk nelayan yang relatif berada pada kelompok usia di atas 40 tahun (BPS Kabupaten Sukabumi, 2020). Pekerjaan sebagai nelayan tidak menjadi pilihan utama generasi muda di desa nelayan.



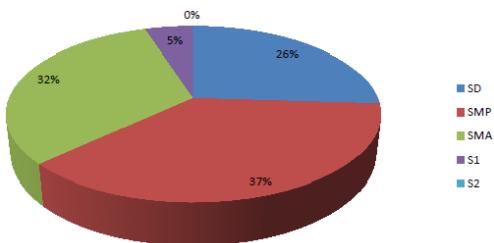
Gambar 1. Komposisi Peserta

Pelatihan Berdasarkan Usia

Sumber: Diolah dari data peserta, 2021

Peserta pelatihan berasal dari empat desa, yaitu desa Palabuhanratu Cisolok, Cikahuripan, dan Cimaja. Berdasarkan kelompok organisasi dan pekerjaan, peserta sebagian besar adalah nelayan, 3 orang anggota anggota kelompok nelayan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), dua orang anggota Organisasi Masyarakat Laskar Laut, dan 2 orang anggota KUB Tusla.

Pendidikan peserta pelatihan berkisar antara SD hingga S1. Persentase terbesar peserta memiliki latar belakang pendidikan SMP. Peserta dengan latar belakang pendidikan S1 adalah peserta anggota HNSI.

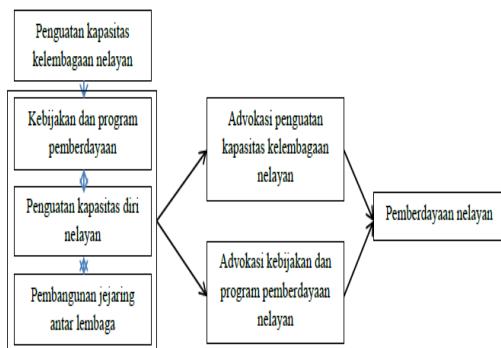


Gambar 2. Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Pendidikan  
Sumber: Diolah dari data peserta, 2021

### Rancangan Materi Pelatihan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan dalam upaya pemberdayaan nelayan. Mengacu pada penjelasan di pendahuluan, langkah penguatan kapasitas kelembagaan untuk pemberdayaan adalah penguatan kapasitas diri nelayan, penguatan kelembagaan wadah nelayan dan membangun jejaring antar lembaga. Ketiga hal ini terbangun dalam kerangka upaya advokasi untuk mendorong kekuatan internal

nelayan dan mendorong kebijakan dan program pemberdayaan nelayan.



Gambar 4. Kerangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Pemberdayaan

Sumber: diolah dari beragam studi pustaka, 2021

Mengacu pada kerangka tersebut, materi pelatihan terdiri dari materi kebijakan pemberdayaan nelayan, program pemberdayaan nelayan, peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan, serta kolaborasi antar dan inter lembaga nelayan. Materi tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Kepala Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan fasilitator dari Universitas Djuanda.

Penentuan materi pelatihan mengacu pada kerangka peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi peningkatan pengetahuan mengenai kebijakan, program dan langkah-langkah penguatan kapasitas

kelembagaan; mendorong sikap siap melakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan terampil dalam menyusun langkah menguatkan kelembagaan nelayan untuk memberdayakan nelayan dengan kekuatan sendiri. Ini menunjukkan materi pertama dan kedua menekankan pada kompetensi pada ranah pengetahuan; materi pelatihan kedua lebih menekankan pada ranah sikap dan materi keempat merangkum ketiga materi sebelumnya untuk mendukung capaian ranah keterampilan.

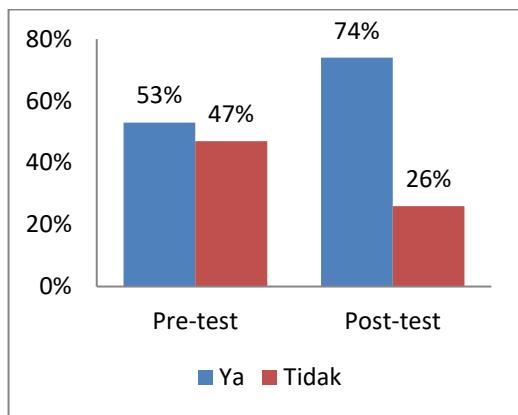
### **Hasil Pelatihan**

Pelaksanaan pelatihan cukup mendorong antusiasme peserta. Hal ini nampak dari hasil monitoring proses pelaksanaan pelatihan. Jumlah pertanyaan dan tanggapan setiap sesi diskusi melebihi lima penanya. Moderator pelatihan perlu membatasi penanya atau penanggap karena keterbatasan waktu. Ini menunjukkan tidak ada sikap bosan dan peserta pelatihan cukup antusias dalam mengikuti pelatihan atau peserta fokus pada pelatihan (Lacerenza et al., 2017).

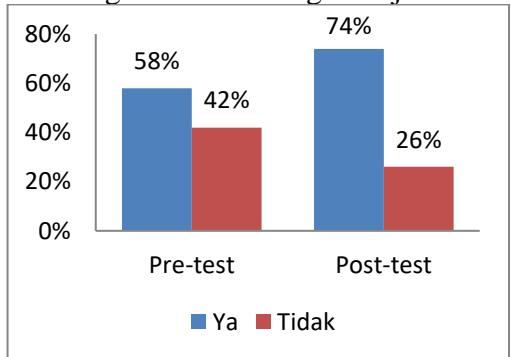
Evaluasi pelatihan menggunakan metode *pre test* dan *post test*. Pertanyaan pada ranah pengetahuan adalah: 1) Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Sukabumi? 2) Apakah bapak/ibu mengetahui program pemberdayaan nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi? 3) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kelembagaan atau kapasitas kelembagaan nelayan? 4) Apakah bapak/ibu mengetahui advokasi kelembagaan yang dilakukan pemerintah maupun diluar Pemerintah?

Berdasarkan keempat pertanyaan tersebut, pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai advokasi mengalami perubahan sebelum dan sesudah pelatihan paling tinggi. Sebelum pelatihan peserta yang menyatakan mengetahui mengenai advokasi kelembagaan hanya 37% dan lebih banyak yang menyatakan tidak mengetahui (63%). Setelah pelatihan, peserta yang menyatakan mengetahui meningkat menjadi 68% atau meningkat 31%. Peningkatan pengetahuan juga terjadi pada

pengetahuan mengenai kebijakan, program dan kelembagaan nelayan. Namun hanya pada pengetahuan mengenai advokasi, komposisi peserta yang sebelum pelatihan lebih banyak yang tidak mengetahui berubah menjadi mengetahui. Ini menunjukkan untuk ranah pengetahuan, materi yang paling berhasil adalah materi mengenai advokasi, disusul oleh materi mengenai kebijakan, program dan kelembagaan.



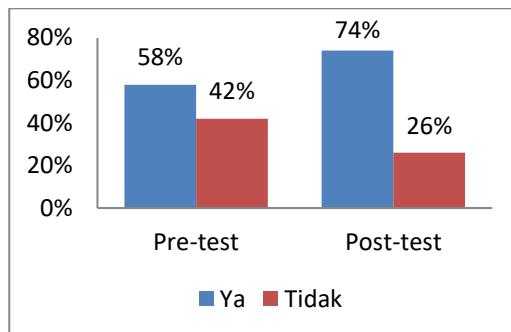
Pengetahuan tentang Kelembagaan



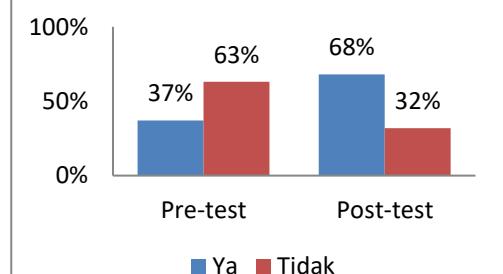
Pengetahuan tentang Kebijakan



Pengetahuan tentang Program



Pengetahuan tentang Advokasi



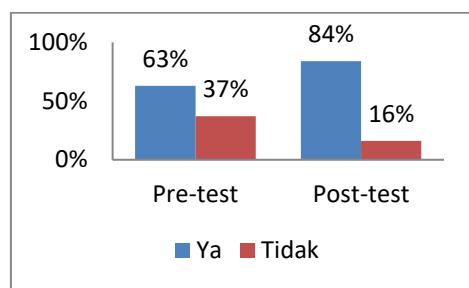
Pengetahuan tentang Kelembagaan

Gambar 5. Perubahan Pengetahuan Berdasarkan Materi Pelatihan

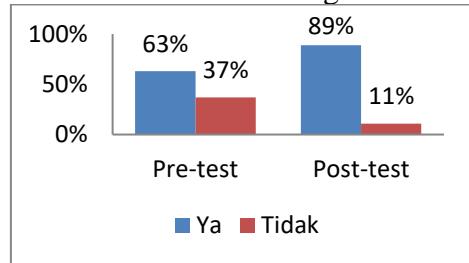
Sumber: Diolah dari hasil *pre test* dan *post test*, 2021

Perubahan pada ranah sikap diukur oleh tiga pertanyaan, yaitu: 1) Apakah bapak/ibu menganggap berguna kerjasama antar lembaga dalam menyelesaikan masalah yang bapak/ibu hadapi? 2) Apakah bapak/ibu menganggap kerjasama antar lembaga mungkin dilakukan? 3) Apakah bapak/ibu menilai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun non-pemerintah selama ini telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan? Hasil *pre test* dan *post test*

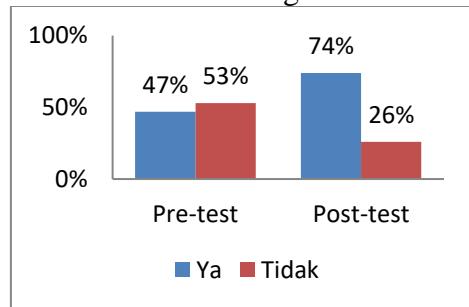
menunjukkan perubahan tertinggi terdapat pada sikap positif terhadap dampak advokasi. Perbedaan perubahan nilai tersebut tidak terlalu jauh berbeda, yaitu 21, 26 dan 27%.



Sikap Positif terhadap Kerjasama Antar Lembaga



Sikap Positif terhadap Mungkin Dilakukannya Kerjasama Antar Lembaga



Sikap Positif terhadap Dampak Advokasi

Gambar 6. Perubahan Sikap Berdasarkan Materi Pelatihan  
Sumber: Diolah dari hasil *pre test* dan *post test*, 2021

Hasil pelatihan pada ranah keterampilan melebihi target capaian

pelatihan pada ranah keterampilan. Target capaian pelatihan pada ranah keterampilan adalah terampil dalam menyusun langkah menguatkan kelembagaan nelayan untuk memberdayakan nelayan dengan kekuatan sendiri. Pengukur capaian ranah keterampilan adalah nelayan mampu menganalisis kebutuhan mereka sendiri, mampu menganalisis cara pemenuhan kebutuhan dan mampu menyusun langkah-langkah untuk membangun kerjasama sinergis untuk memenuhi kebutuhan, memperkuat kapasitas individu dan kapasitas kelembagaan nelayan. Namun, peserta pelatihan tidak hanya mampu menganalisis kebutuhan dan membangun langkah penguatan kapasitas kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan, peserta bahkan melakukan deklarasi nyata pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peserta pelatihan di luar HNSI dan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Laut bersepakat untuk membentuk LSM yang mereka beri nama LSM Ikan Paus.



Gambar 7. Deklarasi LSM Ikan Paus oleh Peserta Pelatihan  
Sumber: Dokumentasi panitia, 2021

### **Acknowledgement**

Artikel ini merupakan keluaran dari Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian pada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Kerjasama antara Universitas Djuanda Bogor dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021.

### **SIMPULAN**

Pelaksanaan pelatihan menunjukkan terdapat perubahan di ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan di ranah keterampilan dan sikap lebih nyata daripada perubahan di ranah pengetahuan. Ini merupakan capaian yang cukup baik dalam pelatihan

singkat satu hari. Waktu pelaksanaan pelatihan yang terbatas terbukti tidak menghambat proses pencapaian sasaran pelatihan. Penggunaan beragam cara penyampaian materi dan teknik advokasi mendorong nelayan dapat secara baik menerima materi pelatihan dan mengartikulasi materi pelatihan dalam bentuk tindakan nyata.

Hasil dari pelaksanaan pelatihan menunjukkan pelatihan dapat berhasil jika didukung oleh perencanaan yang baik mengacu pada hasil penelitian yang memadai, penggunaan beragam metode penyampaian materi dan teknik advokasi dalam pelatihan. Teknik advokasi hanya dapat berhasil jika pelatihan betul-betul dirancang oleh penyelenggara yang mengerti konteks masyarakat nelayan dan kebutuhan masyarakat nelayan sebagai peserta pelatihan. Ini merupakan saran dari pelaksanaan pelatihan ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisa, R. S., Oluwaseun, I. J., & Gbenga, O. (2021). Determinants of capacity building needs of artisanal fishers in Kogi State, Nigeria. *Journal of Asian Rural Studies*, 5(1), 78–89.

- Amarasinghe, O., & Bavinck, M. (2017). Furthering the implementation of the small-scale fisheries guidelines: strengthening fisheries cooperatives in Sri Lanka. In *The small-scale fisheries guidelines* (pp. 379–399). Springer, Cham.
- Berkes, F., & Nayak, P. K. (2018). Role of communities in fisheries management: “one would first need to imagine it.” *Maritime Studies*, 17(3), 241–251.
- BPS Kabupaten Sukabumi. (2020). Kecamatan Pelabuhanratu dalam Angka 2020. Sukabumi: BPS.
- Capistrano, A. D., Hossain, M., & Ahmed, M. (2020). Poverty alleviation, empowerment, and sustainable resource use: Experiments in inland fisheries management in Bangladesh. In *Environmental Sustainability* (pp. 141–162). CRC Press.
- Das, B. K., Roy, A., Som, S., Chandra, G., Kumari, S., Sarkar, U. K., Bhattacharjya, B. K., Das, A. K., & Pandit, A. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic Lockdown on Small Scale Fishers (SSF) Engaged in Floodplain Wetland Fisheries: Evidences from Three States in India. *Environmental Science and Pollution Research*, 1-12.
- De la Cruz-González, F. J., Patiño-Valencia, J. L., Luna-Raya, M. C., & Cisneros-Montemayor, A. M. (2018). Self-empowerment and successful co-management in an artisanal fishing community: Santa Cruz de Miramar, Mexico. *Ocean & Coastal Management*, 154, 96–102.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2021, Agustus). *Trenggono Bawa Sektor Perikanan Tumbuh 9,69 Persen di Triwulan Kedua 2021*. Retrieved from <https://kkp.go.id/djpt/artikel/33379-trenggono-bawa-sektor-perikanan-tumbuh-9-69-persen-di-triwulan-kedua-2021%0Ahttps://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer%0A>
- Diz, D., & Morgera, E. (2018). Insights for sustainable small-scale fisheries. In *Ecosystem Services and Poverty Alleviation* (pp. 288–301). Routledge.
- Ferrero, G., Setty, K., Rickert, B., George, S., Rinehold, A., DeFrance, J., & Bartram, J. (2019). Capacity building and training approaches for water safety plans: A comprehensive literature review. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(4), 615–627.
- Freeman, E. R., Civera, C., Cortese, D., & Fiandrino, S. (2018). Strategising stakeholder empowerment for effective co-management within fishery-based commons. *British Food Journal*.
- Gbenga, O., Solagbero, A. R., & Oluwaseun, I. J. (2020). Analysis of Capacity Building Needs of Artisanal Fishers in Kogi State, Nigeria. *Abuja*

- Journal of Pure and Applied Sciences, 1(2).*
- Guarda, T., Díaz-Nafría, J. M., Augusto, M. F., & Vitor, J. A. (2018, April). Territorial intelligence in the impulse of economic development initiatives for artisanal fishing cooperatives. *International Conference of Research Applied to Defense and Security*, 105–115. Springer, Cham.
- Hanlon, C., Semrau, M., Alem, A., Abayneh, S., Abdulmalik, J., Doerat, S., Evans-Lacko, S., Gureje, O., Jordans, M., & Lempp, H. (2018). Evaluating capacity-building for mental health system strengthening in low-and middle-income countries for service users and caregivers, service planners and researchers. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 27(1), 3–10.
- Hernawan, D., Purnomo, A. M., & Purnamasari, I. (2021). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 631–638.
- Hikmah, H., Yulistti, M., & Nasution, Z. (2017). Pola Pembagian Kerja Dan Kontribusi Gender Terhadap Pendapatan Keluarga: Studi Kasus Rumah Tangga Nelayan Di Desa Batanjung Kabupaten Kapuas. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(1), 93–103.
- Horn, R., O'May, F., Esliker, R., Gwaikolo, W., Woensdregt, L., Ruttenberg, L., & Ager, A. (2019). The myth of the 1-day training: the effectiveness of psychosocial support capacity-building during the Ebola outbreak in West Africa. *Global Mental Health*, 6.
- Jentoft, S., Bavinck, M., Alonso-Población, E., Child, A., Diegues, A., Kalikoski, D., Kurien, J., McConney, P., Onyango, P., & Siar, S. (2018). Working together in small-scale fisheries: harnessing collective action for poverty eradication. *Maritime Studies*, 17(1), 1–12.
- Jentoft, S., & Finstad, B.-P. (2018). Building fisheries institutions through collective action in Norway. *Maritime Studies*, 17(1), 13–25.
- Kompas.com. (2022, Januari). Negara dengan Garis Pantai Terpanjang. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/05/28/130657369/5-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang>
- Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership training design, delivery, and implementation: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 102(12), 1686.
- MacKeracher, T., Foale, S. J., Gurney, G. G., & Purcell, S. W. (2019). Adoption and diffusion of technical capacity-building innovations by small-scale artisanal fishers in Fiji. *Ecology and Society*, 24(2).

- Nurhadi. (2021, November). *10 Daftar Negara dengan Pulau Terbanyak di Dunia, Swedia Urutan Pertama*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1530671/10-daftar-negara-dengan-pulau-terbanyak-di-dunia-swedia-urutan-pertama/full&view=ok>
- Nursey-Bray, M., Fidelman, P., & Owusu, M. (2018). Does co-management facilitate adaptive capacity in times of environmental change? Insights from fisheries in Australia. *Marine Policy*, 96, 72–80.
- Partelow, S., Glaser, M., Solano Arce, S., Barboza, R., & Schlüter, A. (2018). Mangroves, fishers, and the struggle for adaptive comanagement: applying the social-ecological systems framework to a marine extractive reserve (RESEX) in Brazil. *Ecology and Society*, 23(3).
- Penca, J. (2019). Transnational localism: Empowerment through standard setting in small-scale fisheries. *Transnational Environmental Law*, 8(1), 143–165.
- Puspitasari, R., & Resmalasari, S. (2021, February). Social Capital Strength Through Cirebon Power and Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) in the New Normal Era of the Citemu Village Fishermen Community Mundu Sub-District Cirebon District. *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)*, 233–240. Atlantis Press.
- Quimby, B., & Levine, A. (2018). Participation, power, and equity: examining three key social dimensions of fisheries comanagement. *Sustainability*, 10(9), 3324.
- Scholtens, J., Song, A. M., Stephen, J., Chavez, C. G., Bavinck, M., & Sowman, M. (2019). Transdisciplinary engagement to address transboundary challenges for small-scale fishers. In *Transdisciplinarity for Small-Scale Fisheries Governance* (pp. 321–340). Springer, Cham.
- Stephenson, R. L., Paul, S., Wiber, M., Angel, E., Benson, A. J., Charles, A., Chouinard, O., Clemens, M., Edwards, D., & Foley, P. (2018). Evaluating and implementing social-ecological systems: a comprehensive approach to sustainable fisheries. *Fish and Fisheries*, 19(5), 853–873.
- Stephenson, R. L., Wiber, M., Paul, S., Angel, E., Benson, A., Charles, A., Chouinard, O., Edwards, D., Foley, P., & Lane, D. (2019). Integrating diverse objectives for sustainable fisheries in Canada. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 76(3), 480–496.
- Tambani, S. M. J., Rantung, S. V., & Wasak, M. P. (2020). Analisis Gender pada Usaha Perikanan Tangkap Pukat Pantai di Kelurahan Tandurusa

Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 8(2), 188–197.

Yanfika, H., Listiana, I., Mutolib, A., & Rahmat, A. (2019, February). Linkages between extension institutions and stakeholders in the development of sustainable fisheries in Lampung Province. *Journal of Physics: Conference Series*, 1155(1), 12014. IOP Publishing.